PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PURNAMA TIORIA SIANTURI**
2. Jabatan : **DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**
3. NHK : **111433**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.711.250.000**

1. Tanah Seluas 6.726 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 840.750.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.805.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 302 m2/202 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.530.000.000
5. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
6. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 595.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7 GR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.374.500.000**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	297.339.739
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	370.126.152
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	833.000.000
	Sub Total	Rp.	12.181.215.891
III.	HUTANG	Rp.	425.460.179
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.755.755.712

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.